

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentrokan massa kembali terjadi di Kabupaten Lampung Selatan antara Desa Agom Kalianda dan sekitarnya dengan massa Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan pada Oktober 2012. Permasalahan ini pada awalnya sudah bisa di atasi oleh kedua Kepala desa bersangkutan. Tetapi kemudian berkembang isu pemuda Balinuraga melakukan pelecehan terhadap kedua remaja puteri asal Desa Agom saat jatuh dari motor.

Isu beredar menyulut emosi massa yang berakibat bentrokan massal. Akibat isu ini pertikain tidak dapat dihindari dan ribuan massa dari Desa Agom dan sekitarnya melakukan penyerangan ke Desa Balinuraga. Cukup banyak warga kedua Desa menjadi korban dalam peristiwa ini. (<http://www.suarapembaruan.com/home/lampung-selatan-rusuh-3-orang-tewas-6-luka-parah/26254>, Senin, 29 Oktober 2012 pukul 11:37).

Sebenarnya bentrok antar warga di Lampung Selatan pada Oktober 2012 adalah bagian tak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya yang kembali terulang. Konflik tersebut sesungguhnya memiliki akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar perseteruan dua kelompok etnis. Konflik-konflik sebelumnya terkait persoalan transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat

(PIR) hingga tambak udang, sebenarnya masih menyimpan persoalan yang belum tuntas sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul kembali.

Sehubungan dengan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) XII yang digelar di Hotel Santika melahirkan sedikitnya 9 rekomendasi. Rekomendasi ini lahir dari kesadaran perlunya mengusahakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan negara, salah satunya yaitu adalah meminta kepada daerah agar pendanaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri diharapkan tidak menambah beban dan mengurangi kapasitas fiskal daerah dan pemerintah mendorong agar PP turunan UU No 7 tahun 2012 harus melibatkan DPRD untuk mengoptimalkan penanganan konflik sosial. (<http://www.fpks-palu.org/2013/02/rakernas-adeksi-hasilkan-9-rekomendasi.html>, 4 Maret 2013 13.15)

Pemerintah telah mendesak agar PP turunan UU No 7 tahun 2012 dan melibatkan DPRD untuk mengoptimalkan penanganan konflik sosial, sehingga lembaga penanganan konflik seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan peranan yang signifikan dalam penanganan konflik baik melalui bentuk regulasi yang menjadi kewenangannya, maupun melalui kebijakan anggaran melalui sistem APBD.

Pernyataan status keadaan konflik sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden apabila konflik sosial dalam lingkup nasional, oleh Gubernur apabila konflik sosial dalam lingkup provinsi, dan oleh Bupati/Walikota apabila status keadaan konflik dalam lingkup

kabupaten/kotamadya. Penetapan status tersebut tidak dapat begitu saja dikeluarkan oleh pemerintah, namun diperlukan persetujuan dari DPR dalam lingkup nasional, DPRD provinsi dalam lingkup provinsi dan DPRD kabupaten/Kotamadya dalam lingkup Kabupaten/Kotamadya. Berdasarkan kepada RUU PKS pasal 18-20.

Begitu pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan memiliki peranan dalam upaya penanganan konflik agar PP turunan UU No 7 tahun 2012 yang harus melibatkan DPRD.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Way Panji bersama instansi pengamanan terkait juga telah mendorong para tokoh dan warga yang bertikai terus berunding, guna mencari kesepakatan damai di antara mereka.

Perdamaian telah tercipta melalui pimpinan adat masyarakat Lampung dan Raja Bali juga telah menggelar pertemuan guna mencegah terulangnya kerusuhan antara Desa Balinuraga dan Desa Agom, Lampung Selatan. Pertemuan yang dijaga polisi ini menghasilkan maklumat yang ditandatangani Raja Bali I Gusti Ngurah Arya dan Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kadarsyah Irsya. Tokoh bali dan Lampung pun ikut tanda tangan. Rapat juga dihadiri oleh mediator perdamaian Lampung Selatan, Kepala Desa Agom Muchsin Syukur, Kades Balinuraga Ketut Wardana, dan Kades Sidoreno Basuri.

(<http://sekelumitinfo.wordpress.com/2012/11/05/perdamaian-suku-bali-lampung-akhirnya-disepakati/>, 16 November 2012 01:44)

Lembaga semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan sebagai media yang mampu berperan dalam menjembatani perbedaan-perbedaan. Terutama dari perbedaan budaya, sintesa seni sangat bagus untuk menghindari konflik. Apabila perbedaan-perbedaan itu tidak mampu dicairkan dan didialektikakan sejak awal, maka konflik pasti akan tersimpan lama, tersembunyi dari kegiatan sehari-hari dan akan muncul menjadi kekerasan apabila kondisinya telah memuncak.

Kekerasan seperti ini mungkin akan diam di bawah permukaan rutinitas sehari-hari, tetapi konflik yang merupakan akar dari kekerasan itu tetap tersimpan ibarat magma gunung berapi. Hanya dengan sedikit pemicu saja telah mampu untuk meletuskan konflik itu menjadi kekerasan terbuka.

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga pernah mengatakan peranan DPRD dalam penanganan konflik harus dimaksimalkan dengan meningkatkan fungsi-fungsi lembaga perwakilan rakyat tersebut, saat berbicara di hadapan anggota Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (Adeksi) di Kota Palu. (<http://m.antaranews.com/berita/358208/jk-minta-peran-dprd-dimaksimalkan-atasi-konflik>, minggu 5 Mei 2013).

DPRD Lampung Selatan tentu menyadari bahwa konflik adalah salah satu tantangan yang harus diatasi secara menyeluruh, termasuk diantara konflik horizontal, Konflik Sosial, yang selanjutnya adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas

nasional dan menghambat pembangunan nasional misalnya adalah konflik Balinuraga yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Way Panji.

Ketika semua elemen sibuk mengatasi konflik di Balinuraga, peranan DPRD bersama-sama pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencari solusi penyelesaian yang bisa diterima kedua belah pihak yang sedang bertikai, melakukan berbagai inisiatif untuk meredam terjadinya konflik.

Sinergitas perlu dibangun dalam hal pendistribusian informasi-informasi melalui potensi media yang sesuai dengan sifat-sifat demografis publik/masyarakat. berperan dalam mendorong para pihak itu segera berhenti melakukan kekerasan, berhenti saling bertikai, mengajak untuk bersama bergandengan tangan membangun Lampung "Sang Bumi Ruwa Jurai" menjadi lebih beradab, bermartabat, dan semakin maju.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dan berdasarkan terjadinya konflik antar suku di Desa Balinuraga, maka secara umum masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peranan anggota DPRD Lampung Selatan pada dapil wilayah konflik dalam penanganan konflik Balinuraga Agom?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan suatu penjelasan yang mendalam mengenai peranan dan perbandingan peranan anggota DPRD Lampung Selatan pada daerah pemilihan wilayah konflik dalam penanganan konflik Balinuraga-Agom.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan sosial.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagi kita semua.